

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis pada penelitian kali yang berjudul Analisis Bentuk Perlawanan *Protest Voters* Dalam Pilkada Serentak Kabupaten Bantul Tahun 2015 dapat ditarik kesimpulan yang terdiri dari :

##### 1. Kelahiran *Protes Voters* dalam melemahkan kekuatan partai pengusung Petahana

Kehadiran *Protes Voters* merupakan bentuk kekecewaan terhadap rezim yang berkuasa, kekecewaan tersebut disebabkan kebijakan partai yang selalu menokohkan dan mementingkan kepentingan satu golongan dan mengesampingkan kepentingan khalayak ramai. Penokohan yang terjadi menciptakan kondisi terhambatnya kaderisasi partai, kondisi tersebut memaksa *Protest Voters* menciptakan suatu gerakan perlawanan disebabkan kebijakan partai terkait Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul tidak sesuai dengan mekanisme dan filosofi partai, gerakan perlawanan yang dilakukan dengan membentuk sebuah perkumpulan yang menamakan diri Jas Merah. Tujuan *Protest Voters* untuk memutus dinasti politik Drs. H Idham Samawi, Dinasti Politik yang diciptakan petahana dianggap menuju kearah korupsi, kolusi dan nepotisme. Peranan penting *Protest Voters* adalah mampu menemukan sosok figur penantang

petahana pada Pemilu 2015.

2. *Protest Voters* mengimplementasikan perlawanan dengan Perlawanan terbuka dan tertutup. Sistem perlawanan terbuka mengharuskan *Protest Voters* untuk secara terbuka menolak memilih petahana pada Pemilu 2015, sistem perlawanan terbuka ditandai dengan dibentuknya sebuah perkumpulan yang diberi nama Relawan Jas Merah untuk mendukung dan memenangkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati selain petahana. Keberanian tersebut disebabkan *Protest Voters* didukung mayoritas kader-kader internal PDIP Bantul. Berkaitan dengan perlawanan tertutup yang dilakukan adalah dengan menutup akses komunikasi dengan Partai Pengusung petahana sampai dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait Pemenang Pemilu 2015 dan selama masa kampanye *Protest Voters* tidak menggunakan atribut partai pengusung petahana.

3. Efektivitas gerakan Perlawanan *Protest Voters*

Keberhasilan *Protest Voters* dalam menjatuhkan rezim petahana didasari oleh aktivitas dalam memanfaatkan peluang dan celah-celah yang dimiliki petahana, keberhasilan *Protest Voters* dalam merebut suara petahana dikarenakan *Protest Voters* bergerak secara gerilya dibawah permukaan sampai menjelang hari pencoblosan. Strategi tersebut tidak terbaca oleh tim pemenangan petahana yang kemudian diperburuk dengan sifat arogansi di tataran internal tim pemenangan petahana. Keberhasilan *Protest Voters* dalam merumuskan marketing politik yang mudah diterima oleh masyarakat yang dibingkai dalam satu kesatuan yang

berbunyi “Mari Bergerak Bangkitkan Perubahan”. Marketing politik tersebut dirumuskan lebih rinci yang memuat 3 aspek yakni :

- a) petahana membangun dinasti politik,
- b) petahana terlibat dalam kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),
- c) petahana bukan merupakan putra/putri asli daerah Bantul.

#### 4. Bentuk-bentuk Mobilisasi yang dilakukan *Protest Voters*

*Protest Voters* mampu memobilisasi kader-kader PDIP diseluruh kecamatan secara mayoritas untuk menolak petahana dalam penjaringan bakal calon yang dilakukan oleh partai, strategi yang digunakan dengan melakukan pendekatan kultural kepada kader-kader pengusung petahana, komunikasi yang dilakukan membangun paradigma bahwa runtuhnya rezim petahana akan menciptakan demokrasi di Bantul dan di internal PDIP akan tumbuh dan berkembang.

Mobilisasi yang dilakukan *Protest Voters* tidak berhenti pada meyakinkan kader-kader PDIP untuk menolak mendukung petahana akan tetapi mampu meyakinkan kader-kader PDIP untuk menggunakan hak pilihnya dengan memilih selain petahana, dan mengutuk keras sikap GOLPUT meski hal tersebut bersebrangan dengan intruksi partai.

## **B. Saran**

### 1. Partai Politik

a. Partai Politik seharusnya menghadirkan sosok Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul sesuai dengan aspirasi kader-kader partai dan mendahulukan kepentingan mayoritas kader bukan mendahulukan kepentingan golongan atau kepentingan individu.

b. Partai Politik seharusnya menggunakan mekanisme yang terbuka, transparan dan partisipatif dalam melakukan penjurangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati sehingga menghasilkan calon kepala daerah sesuai dengan keinginan mayoritas suara dukungan.

c. Partai Politik sejatinya tidak bergantung pada salah satu sosok figur dalam setiap pengambilan kebijakan partai akan tetapi kebijakan partai bersumber dari mufakat seluruh elemen di internal partai.

d. Partai Politik semestinya memahami bahwa demokrasi merupakan sistem dengan derajat ketidakpastian yang tinggi, sehingga untuk memperoleh kemenangan dalam demokrasi harus dilakukan dengan perjuangan yang tidak mengenal lelah.

e. Pada Pemilu pada nama besar Partai Politik tidak menjamin kemenangan akan tetapi konstituen dalam hal ini masyarakat lebih memilih untuk melihat sosok

calon pemimpin sehingga Partai Politik diwajibkan menjaring dan menyaring figur-figur pemimpin sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

## 2. Penyelenggara Pemilu

a. Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPUD Bantul perlu melibatkan relawan demokrasi dan meningkatkan jumlah kuantitas alat peraga kampanye dalam meningkatkan partisipasi pemilih, karena pada Pemilu Bantul 2015 KPUD Bantul belum mampu memenuhi target yang diberikan KPU RI terkait dengan persentase pemilih sebesar 77,5 % sedangkan realita yang terjadi di Pemilu Bantul persentase pemilih hanya mencapai angka 75,27 %

b. KPUD dan Kemendagri perlu melakukan harmonisasi antar regulasi khususnya dibidang keuangan, sehingga proses penyusunan program dapat diselaraskan dengan penyusunan anggaran untuk mewujudkan kepastian penyelenggaraan pemilihan.

c. KPUD perlu memperhatikan regulasi terkait dengan rekrutmen badan *Ad Hoc*, terutama terkait dengan pembatasan masa jabatan dua periode, hal ini perlu dikaji ulang karena akan menyulitkan bagi daerah-daerah yang memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam mengisi pos-pos yang ada dalam badan *Ad Hoc* yang meliputi PPK, PPS dan KPPS.